

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DENGAN PELAKU ANAK
(Studi Kasus di Polres Boyolali)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Program Studi Hukum Pada Fakultas Hukum

Oleh:

BAYU PRI ANGGORO

C.100130298

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Pelaku

Anak

(Studi Kasus di Polres Boyolali)

PUBLIKASI ILMIAH

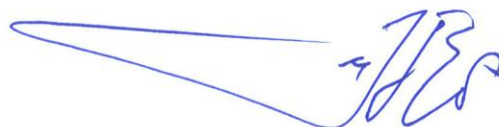
Yang ditulis oleh:

BAYU PRI ANGGORO

C100130298

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



(Muchammad Iksan, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Selasa, 7 November 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Muchamad Iksan, S.H., M.H.

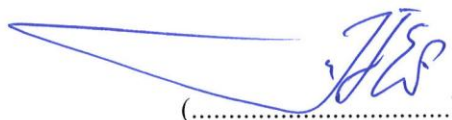
(Ketua Dewan Penguji)

2. Hartanto, S.H., M.Hum.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dr. Natangsa Surbekti, S.H., M.Hum.

(Anggota II Dewan Penguji)



(.....)



(.....)



(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.)

NIK. 537 / NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Naskah Publikasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 7 November 2017

Yang membuat pernyataan,



BAYU PRI ANGGORO

C.100.130.298

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DENGAN PELAKU ANAK
(Studi Kasus di Polres Boyolali)**

ABSTRAK

Penyidikan merupakan tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, hal ini diatur dalam Paasal 1 angka (1) KUHAP . Salah satu macam tindak pidana pencurian adalah pencurian dengan kekerasan, di mana pelaku dari tindak pidana ini tidak selalu orang dewasa terkadang pelakunya adalah seorang anak. Sehingga penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik khusus anak yang diatur dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang tersebut mengatur pula mengenai prosedur melakukan penyidikan jika pelaku tindak pidana adalah anak. Rumusan masalah penelitian ini membahas terkait bagaimana penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak serta hambatan apa yang ditemui penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Polres Boyolali.

Kata Kunci: *Penyidikan, Pencurian Dengan Kekerasan, Pelaku Anak.*

ABSTRACT

The investigation shall be the action of the investigator in the event and according to the manner stipulated in the law to seek and collect evidence which with such evidence makes light of the criminal offense and to find the suspect, this is regulated in Article 1 (1) of the Criminal Procedure Code. One kind of criminal theft is violent theft, in which the offender is not always an adult sometimes the perpetrator is a child. So the investigator who conducts the investigation is a special investigator of the child as regulated in Article 1 number (8) of Law no. 11 of 2012 on the Criminal Justice System of Children The law also regulates the procedure of conducting an investigation if the perpetrator of a crime is a child. The formulation of this research problem discusses how the investigation of criminal acts of theft with violence with child abusers and the obstacles encountered by the investigator in conducting an investigation into the case. The location of this research is in Polres Boyolali.

Keyword: *Investigation, Theft With Violence, Child Abusers.*

1. PENDAHULUAN

Negara disebut sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya.¹

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan diilhami masyarakat sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Norma-norma yang ada dalam masyarakat diantaranya adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum,² yang masing-masing mempunyai fungsi untuk mengatur kelangsungan hidup masyarakat agar berjalan dengan baik dan semestinya.

Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.³ Hal ini adalah sama seperti bunyi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*.⁴

Dewasa ini tindak pidana atau kejahatan yang terjadi di dalam negara ini adalah semakin banyak dan semakin luas, hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang ada antaranya seperti faktor ekonomi, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari.⁵ Selain itu hubungan pergaulan antara sesama juga sangat berpengaruh menjadi suatu faktor dilakukannya tindak pidana yang sering terjadi. Pergaulan yang salah sering

¹ Kaelan M.S dan Achmad Zubaidi, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma, hal. 76.

² E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum*, Jakarta: Kanisius, hal. 35.

³ Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.127.

⁴ Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ Masri Fashadin, 2012, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2010-2012)*" tulisan dalam jurnal Hukum, Universitas Hasanuddin, hal. 9.

menjerumuskan seseorang ke dalam suatu jalan yang salah sehingga akhirnya orang tersebut melakukan suatu tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah tindak pidana percurian yang disertai dengan kekerasan. Ironisnya tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang dianggap sudah dewasa di mata hukum tetapi juga dilakukan oleh seseorang yang dianggap anak di mata hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 butir (2) menyebutkan: *Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*⁶

Sebagai perwujudan negara ini merupakan negara hukum adalah dilakukannya proses penyidikan pada setiap tindak pidana yang terjadi. Pemberlakuan tata cara penyidikan terhadap pelaku tindak pidana oleh penyidik dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam hal ini KUHAP dengan jelas mengatur bagaimana tata cara, maupun prosedur yang harus ditaati oleh penyidik dalam melakukan penyidikan.

Penyidikan harus memperhatikan hak-hak pelaku tindak pidana yang ada di dalam KUHAP. Terlebih lagi pelaku tindak pidana yang terjadi adalah anak, perlakuan yang tidak sesuai tata cara maupun prosedur dalam KUHAP selain dapat mencoreng citra hukum di Indonesia dapat berdampak buruk bagi psikologis anak.

Selain itu, fungsi dari penyidikan yang dilakukan berdasarkan pedoman dalam KUHAP adalah guna memperlancar jalannya penyidikan serta untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan

⁶ Moeljatno, 2014, *Undang-Undang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

⁷ Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Yogyakarta: Gama Press, hal. 504.

terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak di Polres Boyolali, Apa hambatan yang ditemui penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak di Polres Boyolali?

Tujuan Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak di Polres Boyolali, Untuk mengetahui apakah ada hambatan yang ditemui penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak di Polres Boyolali.

Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana khususnya mengenai penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak.

Manfaat praktis, mengembangkan daya pikir, mengembangkan penalaran dalam menganalisis suatu kasus yang kongkrit serta mengetahui kemampuan penulis dengan menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris,⁸ maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan pada data primer di lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif,⁹ dilakukan dengan menganalisis bagaimana penyidikan yang dilakukan penyidik, serta adakah hambatan yang ditemui penyidik dalam kasus pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak di Polres Boyolali. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari sumber utama yaitu fakta atau keterangan berkaitan dengan sumber data yang bersangkutan,

⁸ Yuridis Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Lihat Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 51.

⁹ Metode Deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Lihat Zunaedi, 2007, *Metode Penelitian*, Medan: USU Repository, hal. 11.

data sekunder terdiri dari bahan hukum primer,¹⁰ dalam hal ini berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHAP, dan UU SPPA. Bahan hukum sekunder,¹¹ berupa makalah, hasil karya ilmiah para sarjana dan yang terkait dengan penelitian ini. Metode Pengumpulan Data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengadakan studi penelitian terhadap literatur, buku-buku, dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini dan studi lapangan dilakukan dengan wawancara. Metode analisis data secara kualitatif,¹² dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Pelaku Anak di Polres Boyolali

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 1 angka (8) UU SPPA).

Penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak harusnya dilakukan dengan tatacara atau prosedur yang berlaku sesuai dengan UU no. 11 tahun 2012 tentang SPPA, karena undang-undang tersebut mengatur secara khusus (*Lex Specialis*) mengenai sistem peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

¹⁰ Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Lihat Khudzaifah Dimiyati, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: UMS, hal 7.

¹¹ Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Lihat Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 54.

¹² Metode Kualitatif adalah menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Lihat Sarwono Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 257.

Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak tentunya dilakukan dengan beberapa metode atau proses. Dalam hal ini khususnya di Polres Boyolali penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak dilakukan dengan metode dan proses sebagai berikut: Penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik khusus anak, Penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak di Polres Boyolali dilakukan oleh penyidik anak yang tergabung dalam Unit Kasat Perempuan dan Anak, yang secara khusus menangani kasus anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban tindak pidana. Dalam hal ini Polres Boyolali sudah melaksanakan Pasal 1 angka (8) UU SPPA, bahwa penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah penyidik khusus anak¹³, Upaya diversi, Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.¹⁴ Upaya diversi tetap dilakukan oleh penyidik Polres Boyolali pada saat melakukan penyidikan dalam kasus pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak, yaitu dengan cara mempertemukan kedua belah pihak dalam suatu pertemuan, Penyelesaian perkara secepatnya, Pada tahap ini penyidik Polres Boyolali mengupayakan untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak dengan lebih cepat dibandingkan dengan perkara orang dewasa. Dalam suatu perkara biasanya diselesaikan dalam waktu kurang lebih satu bulan dan sudah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkara tersebut.¹⁵ Hal ini mempunyai tujuan agar anak sebagai pelaku tindak pidana tidak

¹³ Pasal 1 angka (8) UU SPPA

¹⁴ Jurnal Equality (*Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*), Vol. 13 No. 1 Februari 2008.

¹⁵ Bripka Fatmawati, Penyidik Anak Kasat PA Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 jam: 10:15 WIB.

terbebani dengan perkara yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan, Dilakukan dalam suasana kekeluargaan, Penyidik melakukan proses pemeriksaan terhadap pelaku anak, pada saat proses meminta keterangan dari pelaku menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dengan nada yang tidak tinggi. Tidak ada pertanyaan yang menyudutkan terhadap pelaku tindak pidana agar si pelaku mengakui perbuatannya. Hal ini bertujuan agar dalam memperoleh keterangan dari anak sebagai pelaku tindak pidana bisa didapatkan hasil yang sesuai harapan. Pelaku dapat dengan jujur dan dengan jelas mengakui perbuatannya tanpa dibayangi rasa takut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Dengan tutur kata yang halus dan bahasa yang mudah dipahami pada saat meminta keterangan si anak sebagai pelaku tindak pidana psikologis anak tersebut tidak tertekan, tidak dengan menggunakan gaya bicara yang keras dan bahasa yang sulit dipahami mengingat si pelaku tindak pidana adalah anak¹⁶, Hak mendapat bantuan hukum, Polres Boyolali sudah mengimplementasikan dalam praktik penyidikan, khususnya kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan untuk memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum yang dipilih oleh pihak anak pelaku tindak pidana atau keluarganya atau jika pihak anak tersebut tidak mampu, diberikan bantuan penasehat hukum prodeo tanpa dipungut biaya apapun terhadap pihak anak tersebut. Jika dibutuhkan bantuan hukum prodeo terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Polres Boyolali bekerjasama dengan Advokad Joko Nugroho SH untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut.¹⁷ Prosesnya adalah dengan cara pihak Kapolres Boyolali memberikan surat yang berisikan permohonan untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut, kemudian pihak yang bekerjasama dengan Polres Boyolali tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁶ Bripka Yani, Penyidik Anak Kasat PA Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 jam: 10:30 WIB.

¹⁷ Ibnu Anton, Penyidik Anak Kasat PA Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Senin tanggal 7 November 2016 jam: 10:30 WIB.

No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.¹⁸ Dalam kasus dengan tersangka NM, hak memperoleh bantuan hukum ini telah diberikan dengan advokat Joko Nugroho SH, Penangkapan, Dalam penyidikan di Polres Boyolali, terhadap kasus pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak, penangkapan tidaklah selalu dilakukan oleh penyidik, hal ini dikarenakan berdasarkan kasus atau laporan yang masuk sudah ada tersangkanya, jadi tidak perlu dilakukan adanya penangkapan lagi. Pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2017, ada satu kasus yang masuk mengenai perkara pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak dan pada saat dilaporkan ke Polres Boyolali sudah jelas diketahui siapa pelakunya, dan sudah terpenuhi alat bukti serta barang bukti untuk memperkuat bahwa anak tersebut memang benar pelaku dari tindak pidana yang dituduhkan¹⁹, Penahanan, Dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak ada tahapan yang disebut penahanan, walaupun tidak semua tersangka dilakukan penahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU SPPA yang berbunyi:

Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

¹⁹ Ibnu Anton, Penyidik Anak Kasat PA Polres Boyolali, Wawancara Pribadi, Pada hari Senin tanggal 7 November 2016 jam: 10:30 WIB.

Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.²⁰

Penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Boyolali, sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus tersangka NM Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak, yang bersangkutan berusia 17 (tujuh belas) tahun, artinya anak tersebut adalah sudah berusia di atas 14 (empat belas) tahun, tetapi tindak pidana yang dilakukannya mempunyai ancaman hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun. Ancaman hukuman bagi anak atas perbuatannya tersebut adalah selama 3,5 (tiga setengah) tahun.²¹ Dalam kasus tersangka NM, penyidik anak Polres Boyolali tidak melakukan penahanan terhadap pelaku anak tersebut, yang hal ini didasarkan pada Pasal 32 ayat (2) UU SPPA.

Penyidikan harus dirahasiakan, Dalam tindak pidana dengan pelaku anak, identitas anak sebagai pelaku tindak pidana harusnya disembunyikan atau dirahasiakan. Jadi tidak untuk diberitahukan ke khalayak umum. Maka dari itu dalam melakukan penyidikan tindak pidana dengan pelaku anak, khususnya dalam hal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak di Polres Boyolali, penyidik anak melakukan penyidikan dengan merahasiakan identitas pelaku anak serta pada saat dilakukannya penyidikan. Penyidikan dilakukan dengan dirahasiakan baik pada saat dilakukan penyidikan lingkungan sekeliling pelaku anak tersebut, maupun pada tempat kejadian perkara dalam proses pencarian barang bukti maupun alat bukti. Dirahasiakannya identitas anak sebagai pelaku tindak pidana ke khalayak umum, khususnya pers, selama proses penyidikan, bertujuan untuk menjaga psikis anak agar tidak terganggu karena menyandang beban sebagai pelaku tindak pidana, serta untuk menjaga nama baik anak di masyarakat maupun lingkungannya berada.²²

²⁰ Pasal 32 UU SPPA.

²¹ Ibnu Anton, Penyidik Anak Kasat PA Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Senin tanggal 7 November 2016 jam: 10:30 WIB.

²² Ibnu Anton, Penyidik Anak Kasat PA Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 jam: 10:30 WIB.

Dilihat dari bagaimana penyidik anak melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) UU SPPA. Penyelesaian perkara dilakukan dengan secepatnya dengan waktu yang relatif singkat yaitu 30 hari, hal ini untuk menjaga psikis pelaku anak agar tidak terbebani dengan penyidikan yang terlalu lama. Penyelesaian perkara menggunakan upaya diversi terlebih dahulu, upaya diversi ditempuh untuk menghindari kasus tersebut sampai ke Pengadilan Negeri Boyolali, namun berdasarkan 1 (satu) kasus yang masuk diversi tidak berhasil dan kasus tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Boyolali. Pemeriksaan dilakukan dengan suasana kekeluargaan, dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak memojokkan pelaku anak. Hak mendapatkan bantuan hukum diberikan kepada pelaku anak yang bekerjasama dengan Advokat Joko Nugroho, SH, hak mendapatkan bantuan hukum diberikan secara prodeo mengingat anak pelaku tindak pidana merupakan golongan tidak mampu. Penangkapan dan penahanan dilakukan sesuai dengan prosedur di mana dalam 1 (satu) kasus yang masuk penahanan tidak dilakukan karena ancaman hukuman pelaku anak di bawah 7 (tujuh) tahun yaitu 3,5 (tiga setengah) tahun, hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) UU SPPA. Penyidikan dilakukan dengan rahasia, artinya identitas anak dijaga agar tidak diketahui khalayak umum, hal ini bertujuan untuk menjaga psikis anak agar tidak terganggu dan menjaga nama baik pelaku anak di lingkungan masyarakat.

3.2 Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Pelaku Anak di Polres Boyolali

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak secara umum berjalan dengan lancar, walaupun ada hambatan ada hambatan yang menyulitkan bagi penyidik tersebut, namun dapat di atasi dalam praktik.

Ada hambatan yang ditemui penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak di Polres Boyolali tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempermudah atau

mempersulit dan sangat berpengaruh terhadap kinerja anggota penyidik dalam melakukan penyidikan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:²³

Jumlah Anggota Penyidik. Jumlah anggota penyidik anak Polres Boyolali adalah 6 (enam) anggota, pada kasus yang masuk tentang pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak diselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari. Dengan jumlah dan waktu penyelesaian kasus yang singkat berarti tidak ada unsur kekurangan anggota penyidik.

Proses Pencarian Alat Bukti. Proses pencarian alat bukti terkendala pada saat memperoleh keterangan saksi, karena pada saat sakti diminta untuk memberikan keterangannya ada yang tidak mau hadir karena tidak mau mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit

Proses Pencarian Barang Bukti. Proses pencarian barang bukti tidak mengalami kendala, karena pada saat penyidikan dilakukan barang bukti masih berada di tangan pelaku.

Sarana dan Prasarana Penyidik Untuk Melakukan Penyidikan. Sarana dan sudah terpenuhi untuk melakukan penyidikan, baik itu HP, motor, mobil, komputer, dan pistol.

Anggaran Untuk Melakukan Penyidikan. Anggaran untuk melakukan penyidikan adalah Rp.10.00.000,00,- (Sepuluh Juta Rupiah), karena dalam kasus yang masuk bukan merupakan kasus yang susah untuk diselesaikan dan tidak memerlukan waktu yang lama maka anggaran tersebut cukup untuk membiayai penyidikan.

Hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak di Polres Boyolali dilihat dari jumlah anggota atau personil penyidik yang akan ditugaskan melakukan penyidikan tidak ada unsur kekurangan, hal ini berdasar data yang diperoleh pada bulan Juni 2016 sampai bulan Juni 2017 hanya ada 1 (satu) kasus yang masuk mengenai pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak dan dapat diselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari. Proses pencarian alat bukti hanya mengalami

²³ Ibnu Anton, Penyidik Anak Kasat PA Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 jam: 10:30 WIB.

kendala dalam memperoleh keterangan saksi, hal ini dikarenakan saksi tidak dengan jelas melihat siapa pelaku tindak pidana karena pada saat kejadian itu pelaku sudah melarikan diri, serta saksi tidak hadir untuk memberikan keterangannya karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Proses pencarian barang bukti tidak mengalami kendala, karena pada saat proses pencarian tersebut barang bukti masih berada di tangan pelaku. Sarana dan prasarana penyidik untuk melakukan penyidikan serta anggaran untuk melakukan penyidikan tidak ada unsur kekurangan, semua sudah sesuai kebutuhan penyidik untuk melakukan penyidikan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana pencurian dengan Kekerasan dengan pelaku anak di Polres Boyolali dilakukan berdasar pada ketentuan KUHAP dan UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA. Penyidikan dilakukan oleh penyidik khusus anak tergabung dalam unit Kasat PA dengan mengupayakan diversi terlebih dahulu untuk menyelesaikan perkara. Penyelesaian perkara secepatnya dilakukan oleh penyidik anak agar perkara cepat selesai dan proses memperoleh keterangan terdakwa dilakukan dengan suasana kekeluargaan menggunakan bahasa yang baik serta mudah dipahami. Hak memperoleh bantuan hukum diberikan kepada pelaku tindak pidana, penangkapan dan penahanan dilakukan sesuai dengan prosedur. Penyidikan dilakukan secara rahasia dengan tidak mengekspos identitas pelaku anak ke khalayak umum.

Hambatan yang ditemui penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak di Polres Boyolali dilihat dari jumlah anggota penyidik yang akan ditugaskan untuk melakukan penyidikan adalah tidak ada unsur kekurangan personil, melihat dalam setahun saja hanya ada satu kasus yang masuk dan juga kasus tersebut dapat terselesaikan dalam waktu yang singkat yaitu dalam 15 (lima belas) hari.

Proses pencarian alat bukti ada kalanya mengalami kendala diantaranya pada saat proses memperoleh keterangan saksi dikarenakan saksi ada yang tidak mau hadir memberikan keterangannya juga ada pula yang tidak dengan jelas mengetahui kronologi pada saat terjadinya tindak pidana. Pada proses pencarian barang bukti tidak mengalami kendala karena pada saat dilakukan penyidikan barang bukti masih berada di tangan pelaku dan belum ada yang dihilangkan oleh terdakwa, sarana dan prasarana untuk menunjang penyidikanpun terpenuhi tanpa kurang suatu apapun, begitu pula anggaran yang ada untuk menyelesaikan kasus ini tidak ada unsur kekurangan.

4.2 Saran

Untuk menjaga kekompakan agar dalam setiap menangani kasus yang masuk dapat cepat terselesaikan dan hal ini juga agar tidak memberikan beban kepada anak pelaku tindak pidana karena harus menjalani proses penyidikan.

Untuk memudahkan penyidikan dalam hal memperoleh keterangan saksi, agar saksi yang dipanggil bersedia hadir untuk diperiksa keterangannya hendaknya penyidik memberikan pengertian terlebih dahulu terhadap saksi tersebut bagaimana pentingnya partisipasi mereka serta memberikan pengertian hak-hak mereka yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dimiyati, Khudzaifah, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: UMS.

Fashadin, Masri 2012, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2010-2012)*" tulisan dalam jurnal Hukum, Universitas Hasanuddin.

Jonathan, Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Yogyakarta: Gama Press.

Moeljatno, 2014, *Undang-Undang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.

M.S, Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma.

Sumaryono, E, 2002, *Etika dan Hukum*, Jakarta: Kanisius.

Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Sorjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zunaidi, 2007, *Metode Penelitian*, Medan: USU Repository.

Jurnal:

Fashadin, Masri 2012, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2010-2012)*" tulisan dalam jurnal Hukum, Universitas Hasanuddin.

Jurnal Equality (*Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*), Vol. 13 No. 1 Februari 2008.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.